

REFERENCES

- Aryadji. (2018). Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW. Retrieved July 13, 2018, from <http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>
- Astuty, E., & Fanida, E. H. (2011). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareg Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).
- Atmadja, A. T., Adi, K., & Saputra, K. (2015). Pencegahan Fraud Keuangan Desa, *1*, 7–16.
- BPK. (2018). Glosarium Badan Pemeriksa Keuangan. Retrieved July 13, 2018, from <http://www.glosarium.bk.go.id>
- Budiono, B. S. (2009). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo), *000(37)*, 1–19.
- Chodijah, S. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta), *8(1)*, 34–48.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (n.d.). Stewardship Theory or Agency theory: CEO Governance and Shareholder Returns, (June 1991), 49–65. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa , Kebijakan Desa , Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang), *10*, 26–32.
- Fatimah, D., Sari, R. N., & Rasuli, M. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi Media Riset Akuntansi Dan KEUANGAN*, *3(1)*, 1–16. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fenn, P., & Veljanovski, C. G. (2016). A Positive Economic Theory of Regulatory Enforcement, *98(393)*, 1055–1070. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2233719>

- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Haza, I. I. (2008). Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang) Oleh : Irfan Ikhwanul Haza (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang).
- Herbig, P., Palumbo, F., & O'Hara, B. S. (1994). Total Quality and the Human Resource Professional. *The TQM Magazine*, 6(2), 33–36. <https://doi.org/10.1108/09544789410054000>
- Indonesia Corruption Watch. (2018). Outlook dana desa 2018: Potensi penyalahgunaan anggaran dana desa di tahun politik, (6).
- Irma, A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 3(1), 121–137. Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4254>
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (Universitas S. M. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Ekonomi Dan Bisnis*, XIX(2), 323–340.
- Khilmiyah, I. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Ampeldento Kabupaten Malang), 5.
- Lado, A. A., & Wilson, M. C. (2009). Human Resource Systems and Sustained Competitive Advantage: A Competency-Based Perspective. *Academy of Management Review*, 19(4), 699–727.
- Mamelo, G. Y. R., Kalangi, L., & Lambey, L. (2016). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan dana desa pada desa-desa dalam wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7(2), 148–159. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/13558/13144>
- Mattli, W., & Büthe, T. (2005). Accountability in accounting? the politics of private rule-making in the public interest. *Governance*, 18(3), 399–429. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2005.00282.x>
- Maxwell, D. L., Cover, D., & Hughes, J. M. B. (1985). Effect of respiratory apparatus on timing and depth of breathing in man. *Respiration Physiology*, 61(2), 255–264. [https://doi.org/10.1016/0034-5687\(85\)90130-6](https://doi.org/10.1016/0034-5687(85)90130-6)
- Nirwana, & Haliah. (2018). Determinant factor of the quality of financial statements and performance of the government by adding contextual factors. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0014>

- Papaioannou, S. K., & Dimelis, S. P. (2007). Information Technology as a Factor of Economic Development: Evidence from Developed and Developing Countries. *Economics of Innovation and New Technology*, 16(3), 179–194. <https://doi.org/10.1080/10438590600661889>
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pratolo, S., Jatmiko, B., & Anwar, M. (2016). "Financial Statement Public Sectors Berbasis WEB-ICT: Pola Pemetaan Laporan Keuangan Melalui WEB-ICT Untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus SKPD Kabupaten Bantul). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, 1(1), 119–130. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Roberts, J., & Scapens, R. (1985). Accounting systems and systems of accountability - understanding accounting practices in their organisational contexts. *Accounting, Organizations and Society*, 10(4), 443–456. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(85\)90005-4](https://doi.org/10.1016/0361-3682(85)90005-4)
- Saputra, I. W. (1953). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Le Progrés Médical*, 81(2), 40.
- Saputra, J. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, dan Pelaporan atau Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Sari, D. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional (SNAB 2012)*, 718–727. <https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2007.02.020>
- Setyoko, P. I. (2011). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 14–24. <https://doi.org/10.14411/eje.2014.050>
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. (n.d.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang, (1), 179–192. Retrieved from

<https://media.neliti.com/media/publications/144499-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas.pdf>

Sofyani, H. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Soimah, S. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah, (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bengkulu Utara.).

Sutinen, J. G., & Kuperan, K. (1999). A socio-economic theory of regulatory compliance. *International Journal of Social Economics*, 26(1–3), 174–193. <https://doi.org/10.1108/03068299910229569>

Thomas, C. (1998). Information Technology As Competitive Advantage : The Role of Human, 18(May 1997), 375–405.

Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Van Beest, F., Braam, G., & Boelens, S. (2009). Quality of Financial Reporting : measuring qualitative characteristics. *Nijmegen Center for Economics (NiCE) Working Paper 09-108*, (April), 1–41. Retrieved from www.ru.nl/publish/pages/516298/nice_09108.pdf

Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV(2), 148–152.